

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pepatah ekonomi mengatakan “*When the United States sneezes, the rest of the world catches a cold*” ; hal itu menunjukkan bahwa peran Amerika Serikat (AS) dalam dunia internasional terutama dalam hal ekonomi sangat penting. Ekonomi AS dipandang sebagai mesin penggerak dari ekonomi dunia. Tanda-tanda perlambatan ekonomi di AS menimbulkan kekhawatiran tentang dampak dan konsekuensi apa yang akan timbul terhadap negara lain. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang terjadi di AS pada tahun 2008 menyebar ke Eropa, krisis tersebut membuat harga saham global jatuh dan melemahkan dollar AS ke rekor tertinggi US \$1,4967 terhadap Euro pada waktu ditetapkan tahun 1999 sebesar US\$1,16675.<sup>1</sup>

AS merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis modern. Sistem ekonomi ini diperkuat dengan pembangunan infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. AS memiliki kekuatan ekonomi yang besar sejak akhir Perang Dunia II. Banyak indikator yang menjadikan AS sebagai negara yang adidaya dalam bidang ekonomi diantaranya, mata uang milik AS yaitu dollar dijadikan sebagai acuan untuk negara-negara seluruh dunia, AS memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar \$15,8 triliun pada tahun 2012 yang merupakan seperempat dari PDB

---

<sup>1</sup> Teguh Sihono. Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Asia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 2009

dunia.<sup>2</sup> AS juga merupakan salah satu negara terkaya di dunia yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, infrastruktur yang maju, dan produktivitas yang tinggi.

Akan tetapi, hari ini AS harus berurusan dengan dampak dari masalah ekonomi yang jauh lebih buruk. Masalah ekonomi yang terjadi termasuk dampak dari krisis keuangan paling parah. Melambatnya ekonomi AS pada akhir tahun 2007 membuat spekulasi bahwa ekonomi AS berada di ambang resesi, terutama dampak krisis kredit yang telah meluas dari sektor perumahan ke sektor manufaktur dan mengarah ke sektor tenaga kerja. AS yang memiliki kekuatan ekonomi terkuat di dunia dan memberikan kontribusi sekitar 20-30% dari perputaran ekonomi dunia, ternyata tidak mampu menopang ekonominya akibat krisis kredit pada pasar *mortgage* senilai US \$1,8 triliun.

Para analis ekonomi mendeskripsikan kebangkitan Tiongkok dari negara miskin dan stagnan menjadi kekuatan ekonomi besar dalam rentang waktu hanya 28 tahun sebagai salah satu kisah sukses ekonomi terbesar di zaman modern. Sebelum tahun 1979, Tiongkok mempertahankan sistem ekonomi Uni Soviet di mana negara menguasai sebagian aspek ekonomi. Namun, mulai tahun 1979, Tiongkok mulai melakukan serangkaian reformasi seperti pasar bebas dan mulai membuka diri terhadap dunia dalam hal perdagangan dan investasi yang menyebabkan perekonomian Tiongkok tumbuh pesat. Perekonomian Tiongkok mulai tumbuh pesat sejak pemerintahan Deng Xiaoping yang mulai membuka perekonomian negara pada tahun 1979. Kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping adalah dengan membuka diri terhadap para investor

---

<sup>2</sup> Yudha Sukmanata. *Masalah Kependudukan di Negara Adi Daya*. Diambil kembali dari Kompasiana: [http://www.kompasiana.com/ndaddicted/masalah-kependudukan-di-negara-adi-daya\\_54f385bd745513a12b6c7944](http://www.kompasiana.com/ndaddicted/masalah-kependudukan-di-negara-adi-daya_54f385bd745513a12b6c7944). Di akses pada 30 Desember 2014.

asing yang membawa masuk modal ke Tiongkok dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI). Kebijakan tersebut membuat Tiongkok tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar di Asia pada akhir tahun 1990-an.

Sejak pembukaan untuk perdagangan luar negeri dan investasi dan menerapkan reformasi pasar bebas pada tahun 1979, Tiongkok telah menjadi di antara negara-negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, dengan PDB nyata tahunan rata-rata hampir 10% sampai dengan tahun 2014. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok muncul sebagai kekuatan ekonomi global utama. Saat sekarang ini Tiongkok menjadi yang terbesar di dunia dalam hal ekonomi secara paritas daya beli, produsen, perdagangan barang, dan pemegang cadangan devisa. Banyak yang berpandangan dengan peningkatan serta perkembangan ekonomi Tiongkok akan menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan hegemoni baru bukan hanya di Asia, tetapi juga di dunia internasional.

Kenaikan ekonomi Tiongkok memiliki implikasi yang signifikan bagi AS. Ekonomi Tiongkok secara jelas telah berhasil mengejar AS dan sangat mungkin untuk meraih kepemimpinan dalam tindakan ekonomi dan perdagangan, dan bahkan bisa terus meninggalkan negara-negara lain. AS tidak pernah menghadapi tes ekonomi semacam ini. Selama lebih dari 60 tahun, AS tidak pernah tertandingi. Ekonomi Tiongkok telah tumbuh sekitar 9% per tahun serta barang dan jasa yang meningkat pesat dalam kualitas dan nilai. Sebaliknya, AS dan Eropa telah berkubang di sekitar pertumbuhan 0% pada tahun 2007-2012. Tiongkok juga telah menggantikan AS dan Eropa dalam mengendalikan lembaga keuangan internasional (*International Monetary Found* (IMF), Bank Dunia, *Inter-American Development Bank*) sebagai pemberi pinjaman prinsip di

Amerika Latin. Sampai saat ini Tiongkok adalah produsen terbesar di dunia dan eksportir, bahkan mendominasi pasar AS.

Investasi infrastruktur adalah salah satu sumber pertumbuhan baru di samping perdagangan. Namun, ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu masalah utama dalam proses pembangunan ekonomi di wilayah Asia. Mengingat kebutuhan infrastruktur modal besar di wilayah dan adanya kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur, Tiongkok memprakarsai pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan ekonomi dan integrasi Asia melalui promosi investasi di sektor infrastruktur.

AIIB adalah sebuah bank pembangunan multilateral untuk abad ke-21 yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan sektor produktif lainnya di Asia, termasuk energi dan listrik, transportasi dan telekomunikasi, infrastruktur pedesaan dan pengembangan pertanian, pasokan air dan sanitasi, perlindungan lingkungan, pembangunan perkotaan, logistik dan lain-lain. Pada akhir Maret 2015, AIIB mengumumkan persetujuan akhir untuk 57 negara sebagai anggota pendiri Bank. Tujuan AIIB didirikan adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan kemakmuran dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia dengan berinvestasi dalam infrastruktur dan sektor produktif lainnya; dan meningkatkan kerja sama regional dan kemitraan dalam mengatasi tantangan pembangunan dengan bekerja dalam kerjasama yang erat dengan lembaga-lembaga pembangunan multilateral dan bilateral lainnya.

Munculnya Tiongkok dengan AIIB sebagai kekuatan ekonomi utama telah menimbulkan kekhawatiran di antara pembuat kebijakan AS. Mereka menganggap bahwa Tiongkok akan mengambil alih posisi AS sebagai negara dengan pengaruh yang besar di Asia-Pasifik. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa AS harus melaksanakan strategi yang tepat untuk menghadapi pembentukan AIIB ini jika tidak ingin statusnya diambil alih oleh Tiongkok.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka muncul pertanyaan :

Bagaimana strategi Amerika Serikat menghadapi pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) oleh Tiongkok ?

## **C. Landasan Teori**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan satu konsep dalam rangka untuk menganalisa bagaimana strategi Amerika Serikat terhadap pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) oleh Tiongkok. konsep tersebut adalah konsep keseimbangan kekuasaan (*balance of power concept*).

### **1. Balance of Power Concept (Konsep Keseimbangan kekuasaan)**

Menurut Liselotte Odgaard, konsep *Balance of Power* idealnya memastikan bahwa kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga tidak ada negara tunggal yang mampu mendominasi suatu negara atau badan yang tersisa. Karakteristik obyektif seperti kekuatan militer dan sumber daya ekonomi menentukan distribusi kemampuan

dan karenanya memainkan peran sentral dalam pendirian dimana negara-negara menempati posisi negara-negara besar.<sup>3</sup> Konsep *balance of power* menjelaskan tentang perilaku banyak negara selama kurun waktu tertentu. Argumen yang diajukan adalah bahwa untuk mencegah timbulnya suatu kekuatan hegemoni, negara-negara cenderung membentuk koalisi dan kontra-koalisi, dan bahwa suatu aktor “*balancer*” akan ikut campur tangan dengan memihak pada yang lebih lemah demi memulihkan perimbangan kekuatan. Menurut argumen ini, perilaku bangsa-bangsa diakibatkan oleh berimbang atau tidak berimbangnya dan oleh ada atau tidak adanya suatu negara agresif yang ingin menciptakan hegemoni dan tokoh “*balancer*”.<sup>4</sup>

Awalnya, konsep *balance of power* menyatakan bahwa kekuatan besar tidak punya pilihan selain untuk menyeimbangkan terhadap ancaman potensial. Namun teori juga menyadari bahwa mungkin negara yang lemah untuk bergabung dengan aliansi jika tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk membuat keseimbangan yang efektif. Sebaliknya, mereka mencoba untuk bergabung dengan kekuasaan yang bercita-cita untuk mendominasi sistem, kebijakan disebut oleh teori sebagai *bandwagoning*.

Saat ini pilar utama argumen *Balance of Power* tidak lagi sesuai dengan kondisi interaksi antar negara-negara. Fokus utama dalam hubungan internasional saat ini bukan lagi mengenai perang. Faktor geo-strategi dulu menjadi perhatian utama, namun kini tidak lagi dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi, dan transportasi.

---

<sup>3</sup> Lisolette Odgaard. *The Balance of Power in Asia Pacific Security, US-China Policies on regional Order*. New York: Routledge. 2007.

<sup>4</sup> Mochtar Mas'od, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. 1990.

Negara-negara saat ini memusatkan perhatian terhadap bagaimana cara memiliki jaringan perdagangan yang luas dan terbuka di beberapa negara, bukan bagaimana meningkatkan pertahanan dan keamanan atau militer negaranya. Kecenderungan agresif tidak lagi menjadi ciri utama *balance of power* sekarang ini, bentuk agresifitas kini lebih banyak pada pembentukan dan pembangunan pasar baru di dunia internasional demi kepentingan ekspansi perdagangan dan pasar modal. Dapat kita lihat dengan banyak terbentuknya pasar bebas maupun regionalisasi dalam bidang ekonomi seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *Free Trade Area (FTA)*, dan lain-lain.

Paul T. V. membagi tiga bentuk *Balance of Power* antara lain 1) *Hard Balancing*, yaitu dengan mempertahankan dan menambah kekuatan militer dalam mengimbangi lawan, negara yang menggunakan strategi ini akan membangun dan selalu memperbarui kekuatan militernya. Selain itu, negara juga membangun serta mempertahankan aliansi tandingannya untuk mengimbangi. 2) *Soft Balancing*, yaitu dimana negara-negara menaikkan intensitas kekuatannya bersama negara kuat lain sehingga dapat meredam adanya negara *rising power* baru yang dapat mengancam. *Soft Balancing* berlangsung ketika negara-negara mengembangkan perjanjian diantara mereka untuk menyeimbangi negara potensial. 3) *Asymmetric Balancing*, merujuk pada usaha negara bangsa dalam menyeimbangi negara kuat dengan aktor subnasional yang bertindak untuk mengancam, seperti kelompok teroris yang tidak memiliki kemampuan untuk menantang negara-negara kunci menggunakan kemampuan militer konvensional.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Paul T.V, 'Introduction : The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance'. Dalam T. Paul, J. J. Wirtz, & M. Fortmann, *BALANCE OF POWER : Theory and Practice in the 21st Century*. California: Stanford University Press. 2004.

Berbeda dengan *traditional balancing*, *Soft balancing* tidak dilakukan secara langsung untuk menentang dominasi militer suatu negara dan menggeser keseimbangan kekuasaan tetapi menggunakan alat-alat non-militer seperti melalui kombinasi tata ekonomi, pengaturan diplomatik, dan lembaga internasional untuk menunda, mempersulit, dan merusak kebijakan sepihak suatu negara.

Menurut Robert A. Pape, terdapat empat strategi bagi sebuah negara untuk melakukan *soft balancing*, yaitu *territorial denial*, *entangling diplomacy*, *economic strengthening*, dan *signals of resolve to balance*.<sup>6</sup> *Territorial denial* atau penolakan teritorial, adalah strategi yang dilakukan oleh suatu negara dengan menolak akses negara *superpower* terhadap teritori di wilayahnya yang ingin digunakan oleh *superpower* untuk keperluan militer. *Entangling diplomacy* atau perumitan diplomatis, merupakan strategi yang dilakukan suatu negara untuk menahan *superpower* yang ingin menggunakan kekuatan militernya melalui jalur-jalur diplomatis pada institusi-institusi internasional atau perundingan-perundingan multilateral.

*Economic strengthening* atau penguatan kekuatan ekonomi. Suatu negara dapat menguatkan kemampuan ekonominya untuk memperbesar porsinya dalam distribusi kekuasaan internasional dan mengurangi kekuatan hegemon dengan cara memperkuat suatu blok perdagangan yang semakin menaikkan volume perdagangan antar anggota dan mengurangi volume perdagangan dengan non-anggota. Dengan melarang *superpower* untuk menjadi bagian dari kerjasama perdagangan, pertumbuhan ekonomi dan transaksi perdagangan *superpower* akan berkurang yang berujung pada pelemahan

---

<sup>6</sup> Robert A. Pape. *Soft Balancing against the United States. International Security*, vol. 30, hlm : 36-37. 2005.

kekuatan ekonomi *superpower*. *Signals of resolve to balance* atau tekad kuat dan komitmen untuk melakukan *balancing*. Negara-negara besar yang ingin melakukan upaya *balancing* secara kolektif sering tidak percaya dengan negara-negara besar lainnya. Mereka khawatir salah satu atau beberapa negara diantara mereka melakukan penghindaran tanggung jawab (*buck-passing*) sehingga harus berhadapan dengan *superpower* tanpa dukungan penuh dari negara-negara besar yang lain yang membuat mereka harus menanggung segala beban dan risiko dalam upaya *balancing* tersebut.

Dengan menerapkan strategi *Economic strengthening*, AS dapat menguatkan kemampuan ekonominya untuk memperbesar porsinya dalam distribusi kekuasaan internasional dan mengurangi kekuatan hegemon dengan cara memperkuat suatu blok perdagangan (TPP) yang semakin menaikkan volume perdagangan antar anggota dan mengurangi volume perdagangan dengan non-anggota. TPP yang terdiri dari AS, Jepang, Kanada, Meksiko, Chile, Australia, Selandia Baru, Singapura, Brunei, Vietnam, Peru dan Malaysia merepresentasikan 40 persen dari produk domestik bruto global, 30 persen dari ekspor global, 25 persen dari impor dan 793 juta konsumen. TPP diperkirakan juga akan menghilangkan sekitar US \$ 100 miliar per tahun ekspor dari Tiongkok. Tiongkok juga akan kehilangan 2,2 poin persentase PDB jika tidak bergabung dengan TPP.<sup>7</sup>

Dalam kasus pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) oleh Tiongkok, AS berupaya keras menghalangi Tiongkok untuk menandingi dominasinya.

---

<sup>7</sup> Cary Huang. *It's the geopolitics, stupid: US-led TPP trade pact less about boosting economies than about containing China's rise*. Diambil kembali dari South China Morning Post: <http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1876024/its-geopolitics-stupid-us-led-tpp-trade-pact-less-about>. 6 November 2015. Di akses pada 25 November 2015.

AS merasa perlu menjaga *balance of power* wilayah Asia. AS mengumumkan niatnya untuk berpartisipasi dalam negosiasi TPP yang mencerminkan prioritas ekonomi dan nilai-nilai AS. AS melakukan negosiasi TPP dengan 11 negara lain yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam untuk menyimpulkan standar yang tinggi, kesepakatan ambisius dan memperluas kelompok awal untuk memasukkan negara tambahan di seluruh wilayah Asia-Pasifik. TPP menetapkan aturan standar tinggi untuk perdagangan, dan menangani masalah-masalah penting pada abad ke-21 dalam ekonomi global. TPP adalah landasan dari kebijakan ekonomi Obama di Asia Pasifik dan upaya untuk membentuk lingkungan strategis di kawasan Asia Pasifik. TPP adalah tentang meningkatkan kekuasaan AS dan menyingkirkan kekuasaan Tiongkok. Dan yang paling penting, TPP adalah tentang “*who rules and who writes the rules*”, Seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Barrack Obama dalam wawancara dengan *Wall Street Journal* tahun 2015: “*If we don’t write the rules, China will write the rules out in that region*”.<sup>8</sup>

#### **D. Hipotesis**

Strategi Amerika Serikat dalam menghadapi pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) oleh Tiongkok adalah melalui penguatan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dengan cara :

- 1) Menerapkan strategi *Economic strengthening*, yaitu dengan memperkuat blok perdagangan (*Trans-Pacific Partnership*) (TPP) yang semakin menaikkan

---

<sup>8</sup> Barrack Obama, WSJ Interview Transcript: President Obama on TPP, China, Japan, Pope Francis, Cuba . (S. Gerald, Pewawancara). Di akses pada 27 April 2015.

volume perdagangan antar anggota dan mengurangi volume perdagangan dengan non-anggota.

- 2) Memaksimalkan peran dan keuntungan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) bagi negara-negara yang tergabung di dalam TPP.

### **E. Jangkauan Pembahasan**

Pembahasan akan dimulai dari perkembangan dan dinamika ekonomi Amerika Serikat (AS) serta perkembangan ekonomi Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi besar yang mulai mengganggu dominasi AS dalam perekonomian dunia, persaingan dalam bidang ekonomi antara AS dan Tiongkok, serta proses pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) oleh Tiongkok serta strategi AS dibawah pemerintahan Presiden Barrack Obama dalam menghadapi pembentukan AIIB.

### **F. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di atas berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yang terdiri dari :

Bab I berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori yang digunakan dalam melihat strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank*

(AIIB), hipotesis, jangkauan pembahasan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi AS dan Tiongkok menjadi negara yang menguasai perekonomian global dan menjadi kekuatan ekonomi nomor satu dan dua di dunia. Pada bab ini juga dijelaskan tentang hubungan antara AS dan Tiongkok bersaing dalam bidang ekonomi di dunia.

Bab III akan menjelaskan tentang pembentukan AIIB oleh Tiongkok, dari tahap awal inisiasi pembentukan AIIB oleh Tiongkok sampai pada tahap perkembangan AIIB. Pada poin selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai potensi AIIB sebagai kekuatan baru di wilayah Asia.

Bab IV akan menganalisa tentang bagaimana *Trans Pacific Partnership* (TPP) sebagai strategi yang diambil oleh AS dalam menghadapi pembentukan AIIB oleh Tiongkok.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan hasil analisa tentang strategi AS dalam menghadapi pembentukan AIIB oleh Tiongkok.